

**LAPORAN  
KINERJA**

**TAHUN**  
2020

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BANDAR LAMPUNG

**LAPORAN KINERJA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BANDAR LAMPUNG 2020**



**KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung telah menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2020.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, tahun 2020 telah berakhir dan dapat kita lampaui ekspektasi kinerja kita bersama dengan baik. Sebagai bagian dari masyarakat di seluruh dunia, pada awal tahun 2020 kita ketahui *COVID-19* masuk sebagai pandemi virus yang mempengaruhi kinerja perekonomian global, terutama Indonesia mulai mengalami lonjakan penurunan, relaksasi target di DJKN pun menjadi upaya untuk mengejar pencapaian keberhasilan IKU di wilayah kerja DJKN.

Hadirnya sambungan internet di dalam kehidupan manusia mengundang implikasi pada pengembangan teknologi internet itu sendiri. Pengembangan teknologi internet khususnya di Kementerian Keuangan terlihat jelas kita rasakan setelah mewabahnya pandemi *COVID-19* ini, pemerintah pusat dengan sigapnya melakukan transisi perpindahan kerja menjadi serba digitalisasi. Sebagai pegawai Kementerian Keuangan kita dituntut untuk belajar dan bekerja dengan cepat dan tepat. Hal ini berbanding lurus dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 KPKNL Bandar Lampung yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung dengan cukup baik sebesar 104,44%.

Tidak kalah penting dan yang paling utama, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, atas kinerja dan kerja sama yang baik sehingga KPKNL Bandar Lampung mampu mencatat berbagai pencapaian selama tahun 2020.

Selamat bekerja kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, tetap bersinergi, terus semangat dan semoga sukses di tahun 2021 ini.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021  
Kepala Kantor,



Didith A. Andiana   
NIP 1970523 199503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
B.    ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	4
C.    PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	9
B.    REALISASI ANGGARAN .....	33
BAB IV PENUTUP .....	34
LAMPIRAN .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rincian Capaian Kinerja KPKNL Bandar Lampung.....	10
Tabel 3. 2 Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang .....	12
Tabel 3. 3 Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung.....	12
Tabel 3. 4 Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara.....	13
Tabel 3. 5 Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.....	14
Tabel 3. 6 Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL.....	15
Tabel 3. 7 Perbandingan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung.....	15
Tabel 3. 8 Persentasi hasil lelang (Pokok Lelang) .....	16
Tabel 3. 9 Perbandingan capaian Persentasi hasil lelang (Pokok Lelang) pada KPKNL Bandar Lampung.....	17
Tabel 3. 10 Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang .....	17
Tabel 3. 11 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan.....	18
Tabel 3. 12 Persentase efektivitas penyelesaian BKP.....	20
Tabel 3. 13 Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi .....	21
Tabel 3. 14 Realisasi dan Target Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi .....	21
Tabel 3. 15 Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).....	22
Tabel 3. 16 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian .....	23
Tabel 3. 17 Persentase produktivitas lelang .....	24
Tabel 3. 18 Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction.....	25
Tabel 3. 19 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi .....	26
Tabel 3. 20 Target dan Realisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung.....	26
Tabel 3. 21 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset .....	27
Tabel 3. 22 Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN .....	28
Tabel 3. 23 Persentase pengembangan kompetensi pegawai.....	29
Tabel 3. 24 Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC.....	30
Tabel 3. 25 Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai.....	31
Tabel 3. 26 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.....	32
Tabel 3. 27 Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran .....	32
Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

KPKNL Bandar Lampung adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Bandar Lampung memiliki visi sesuai dengan Kantor Pusat DJKN yaitu: "Menjadi pengelola kekayaan Negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sementara Misi KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bandar Lampung mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KPKNL Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

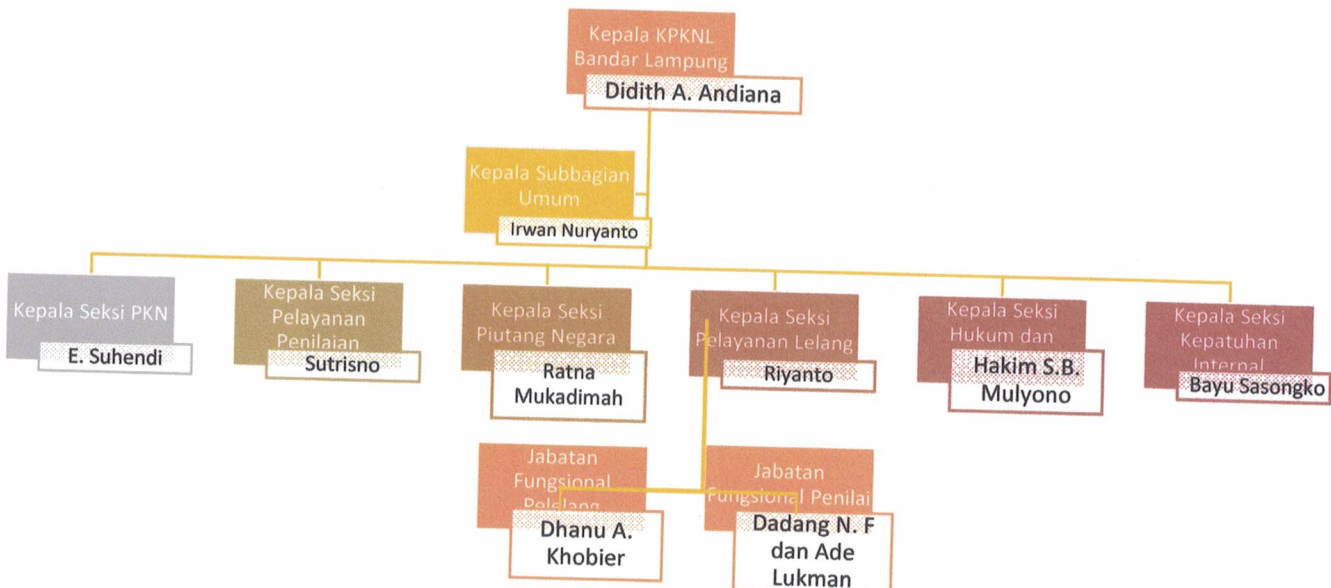
1. Inventarisasi, pengadiministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengadilan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul
5. Penghapusan piutang negara;
6. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

7. Pelaksanaan pelayanan lelang;
8. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
9. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
10. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta hartakekayaan lain;
11. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
12. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
13. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
14. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dibatasi dengan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Adapun wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung tersebar dalam 1 (satu) kota dan 6 (enam) kabupaten di Provinsi Lampung yang meliputi: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor yang didukung oleh enam Kepala Seksi, satu Kepala Subbagian Umum, serta tiga Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi KPKNL Bandar Lampung tergambar pada Struktur Organisasi di bawah ini:

## Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung



### Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Bandar Lampung didukung oleh 37 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN**

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
LAKI-LAKI	0	4	14	2	20
PEREMPUAN	0	8	8	1	17
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>37</b>

**Tabel 1. 2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN**

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTP	0	1	0	0	1
SLTA	0	2	3	0	5
D1	0	1	0	0	1
D3	0	8	2	0	10
D4/S1	0	0	15	1	16
S2	0	0	2	2	4
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>37</b>

**Tabel 1. 3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL**

UNIT KERJA	KOMPOSISI JABATAN			
	JURUSITA	PEJABAT LELANG	PEMERIKSA	PENILAI
	1	1	0	3
SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	0	0	0	1
SEKSI KEPATUHAN INTERNAL	0	1	0	1
SEKSI PELAYANAN LELANG	0	3	0	0
SEKSI PELAYANAN PENILAIAN	0	0	0	1
SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	0	0	0	3
SEKSI PIUTANG NEGARA	1	1	1	0
SUBBAGIAN UMUM	0	0	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Bandar Lampung dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

### 1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, dengan ketentuan seluruh BMN telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya;
- b. Pengawasan dan pengendalian (wasdal) yang efektif;
- c. Penatausahaan dan pengamanan kekayaan Negara yang akuntabel;
- d. Kesadaran akan kepatuhan pengguna layanan (*stakeholder*) yang tinggi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara adalah:

- a. Pengembangan dan implementasi *capacity building* secara periodik dan masif terkait teknis, manfaat sektoral dan nasional pengelolaan aset pada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai upaya pemanfaatan aset melalui mekanisme kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum;
- c. Pengembangan dan penerapan layanan virtual secara bertahap untuk seluruh jenis layanan kepada pengguna jasa.

### 2. Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, *In House Training* di bidang penilaian.
- b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
- c. Melakukan survey data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah KPKNL Bandar Lampung.
- d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

### 3. Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNBPN dari pengurusan piutang negara yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Koordinasi dan sosialisasi pengurusan piutang negara ke instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penggalan potensi piutang K/L dan piutang pemerintah daerah.

- b. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui tahapan pemeriksaan.

#### 4. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNPB dari pelayanan lelang yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain:

- a. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non Eksekusi.
- b. Improvisasi dan inovasi layanan lelang guna peningkatan pelayanan lelang melalui pojok *e-auction*.
- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang yang dilakukan melalui pelaksanaan *Forum Grup Discussion (FGD)* yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang dan juga sebagai sarana *sharing knowledge* bagi Pejabat Lelang.

#### 5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan, *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
- e. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Pengelolaan kinerja yang efektif dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.
- c. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- d. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para stakeholder.
- e. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *sharing knowledge*.
- f. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

### C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF

Dalam pencapaian kinerja tahun 2020, KPKNL Bandar Lampung menghadapi berbagai kendala diantaranya:

1. Respon Satker terhadap pelaksanaan sertifikasi kurang optimal dan bidang tanah yang disertifikatkan tersebar di beberapa wilayah.
2. Piutang yang diserahkan pengurusannya ke KPKNL tidak di dukung dengan barang jaminan
3. Penanggung hutang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya.
4. Rendahnya tingkat kesadaran para penanggung hutang untuk menyelesaikan kewajibannya meskipun secara ekonomi mampu.

5. Obyek lelang kurang marketabel dikarenakan, obyek lelang tersebut masih berpenghuni, terdapat sengketa agrari di daerah tertentu, nilai limit tinggi tidak sebanding dengan resiko sehingga minat beli terhadap obyek lelang tersebut rendah.
6. Pengajuan permohonan lelang hak tanggung dilakukan oleh bank sebagai salah satu upaya *shock* terapi kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga frekuensi laku lelang tidak sebanding dengan lelang yang diajukan.

Langkah-langkah adaptif ke depan yang akan dilakukan oleh KPKNL Bandar Lampung untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah:

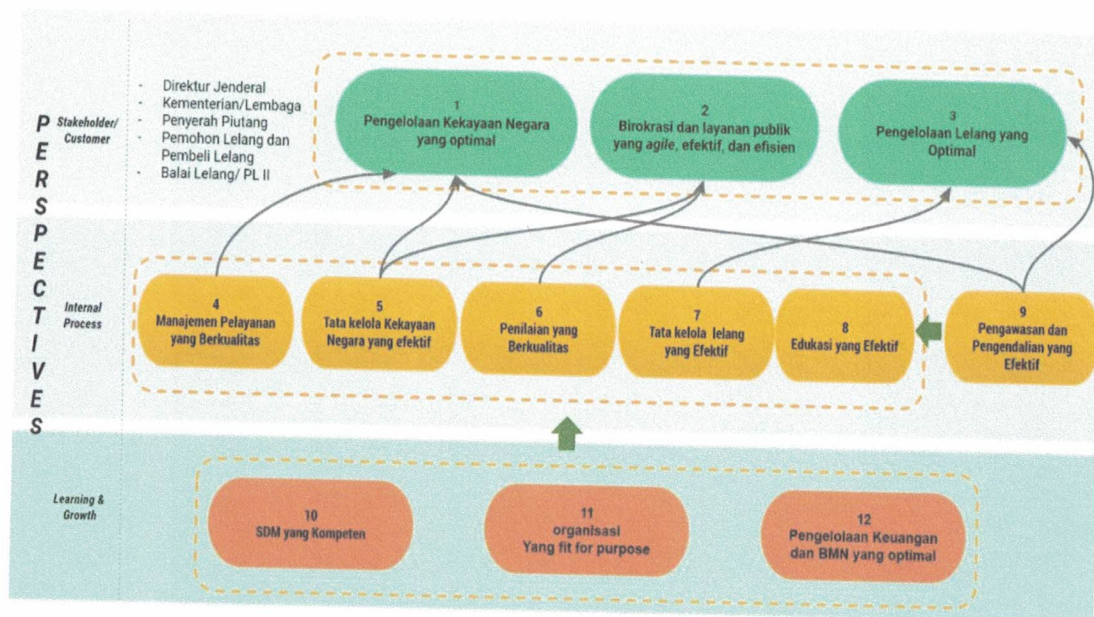
1. Membangun budaya *asset awareness* (tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik) yang efektif, efisien dan optimal di level satuan kerja;
2. Meningkatkan pengelolaan asset sebagai instrument APBN melalui penerimaan PNBK dan pembiayaan belanja modal dan infrastruktur;
3. Membangun budaya virtual yang efektif dalam proses layanan asset, Piutang Negara dan Lelang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 tertuang pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung dihadapan Kepala Kanwil DJKN

Lampung dan Bengkulu. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Peta Strategi pada KPKNL Bandar Lampung Tahun 2020 memuat 12 Sasaran Strategis yang terdiri dari: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal; (2) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien; (3) Pengelolaan lelang yang optimal; (4) Manajemen pelayanan yang berkualitas; (5) Tata kelola kekayaan negara yang efektif; (6) Penilaian yang berkualitas; (7) Tata kelola lelang yang efektif; (8) Edukasi yang efektif; (9) Pengawasan dan pengendalian yang efektif; (10) SDM yang kompeten; (11) Organisasi yang *fit for purpose*; (12) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.



Gambar 2. 1 PETA STRATEGI KPKNL BANDAR LAMPUNG (KEMENKEU-THREE) TAHUN 2020

Tabel 2. 1 PERJANJIAN KINERJA KPKNL BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

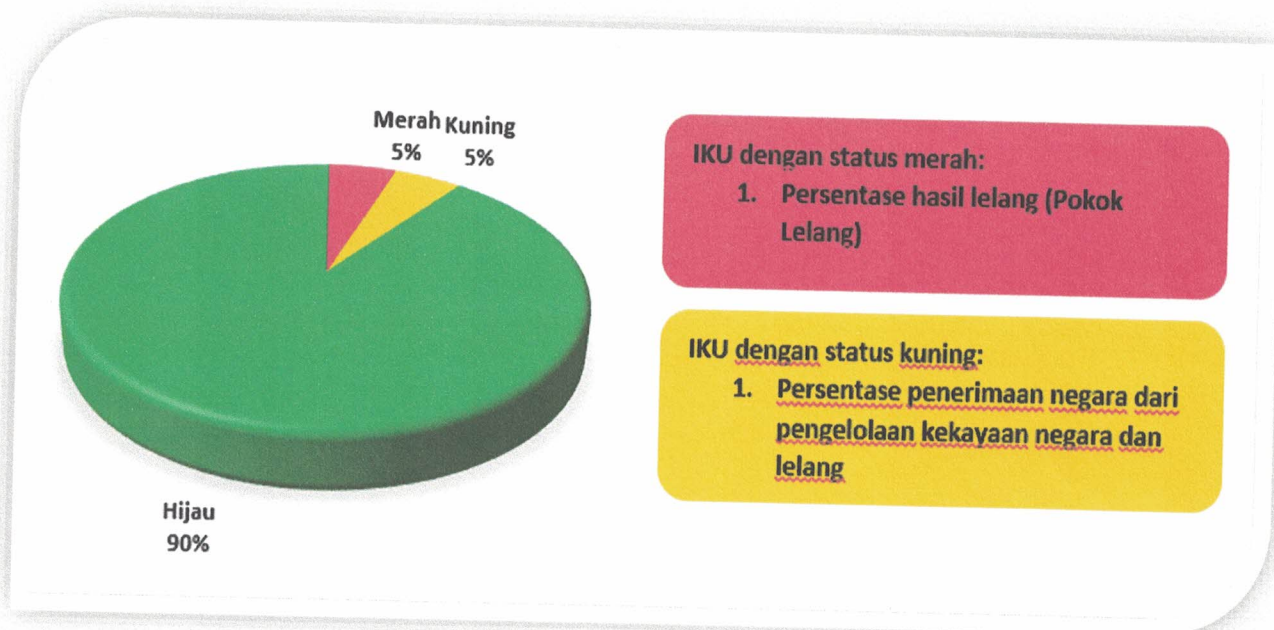
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan Negara yang optimal	1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%
		1c-N	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,37
3	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86
5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
6	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	90%
8	Edukasi yang efektif	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%
		9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70
		11b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 dilakukan dengan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja organisasi yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2020 KPKNL Bandar Lampung menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategi yang terjabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ikhtisar capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 tercatat bahwa dari 20 (dua puluh) IKU terdapat 18 (delapan belas) IKU dengan status hijau (90%), 1 (satu) IKU dengan status kuning (5%), dan 1 (satu) IKU dengan status merah (5%). Ikhtisar capaian kinerja unit Eselon III KPKNL Bandar Lampung tergambar dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Indikator Kinerja Utama

1. IKU dengan status hijau sejumlah 17 (tujuh belas) IKU yang terdiri dari IKU:
  - a. Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016) SS;
  - b. Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK SS;
  - c. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL;
  - d. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang;
  - e. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan;
  - f. Persentase efektivitas penyelesaian BKPn;
  - g. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi;
  - h. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset);
  - i. Deviasi ketergunaan hasil penilaian;
  - j. Persentase produktivitas lelang;
  - k. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*;
  - l. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;

- m. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset;
- n. Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN;
- o. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- p. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC;
- q. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai;
- r. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

2. IKU dengan status kuning sejumlah 1(satu) IKU yaitu: Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.
3. IKU dengan status merah sejumlah 1(satu) IKU yang terdiri dari IKU: Persentase hasil lelang (Pokok Lelang).

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja tahun 2020 diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 104,44% dengan rincian data capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Rincian Capaian Kinerja KPKNL Bandar Lampung**

No.	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%Capaian	Indeks
1	1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	87,92%	87,916%	87,92%
	1b-CP	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDP s.d 2016)	3%	3,81%	126,834%	120,00%
	1c-N	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100,00%	100,00%	100,00%
2	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,37	4,59	105,03%	105,03%
3	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	71,28%	71,28%	71,28%
4	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86	96,51	112,22%	112,22%
5	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	155,21%	155,21%	120,00%
	5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	219,13%	219,13%	120,00%
	5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	179,17%	179,17%	120,00%
6	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0,00%	200,00%	120,00%
7	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%	34,31%	100,92%	100,92%
	7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-	90%	100,00%	111,11%	111,11%

		<i>auction dan e-conventional auction</i>				
8	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88	95,00	107,95%	107,95%
9	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	100,00%	125,00%	120,00%
	9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%	100,07%	100,07%	100,07%
10	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%	120,00%
11	11a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	92,00	131,43%	120,00%
	11b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	91,33	114,17%	114,17%
12	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,30%	100,32%	100,32%
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>						<b>104,44%</b>

Evaluasi dan analisa kerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

#### a. 1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**, antara lain sebagai berikut:

1. Wabah pandemi *COVID-19* dan pembatasan mobilisasi menyulitkan optimalisasi penerimaan PNBPN dari pengelolaan Aset, Piutang dan Lelang;
2. Adanya Perdirjen Nomor 4/KN/2020 yang mengamanatkan menghentikan seluruh proses survey lapangan untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Pegawai pada satuan kerja yang dalam kondisi WFH (*Work From Home*) menyulitkan proses koordinasi pengumpulan informasi objek potensial PNBPN.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi potensi satuan kerja yang dapat berkontribusi terhadap kinerja PNBPN;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terpilah, antara lain satuan kerja yang memiliki potensi PNBPN aset yang besar terkait permohonan persetujuan pemanfaatan BMN dan tindak lanjut dari satuan kerja tersebut setelah mengajukan permohonan adalah dengan menerbitkan persetujuan pemanfaatan;
3. Melakukan himbauan kepada seluruh satuan kerja melalui surat.

Capaian persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara pada KPKNL Bandar Lampung di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal						
	1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	5%	30%	30%	60%	60%	100%	Max/TLK
Realisasi	10,49%	24,94%	24,94%	51,80%	87,98%	87,98%	
Capaian	120,00%	83,12%	83,12%	86,33%	87,98%	87,98%	

Capaian IKU sebesar 87,916% dengan realisasi nilai manfaat ekonomi Rp12.965.207.196,00 diperoleh dari komponen penerimaan negara yang berasal dari:

- a. PNPB Pengelolaan BMN = Rp7.796.577.649 (dari target Rp7.526.415.000).
- b. PNPB Piutang Negara = Rp7.096.870 (dari target Rp869.640,66).
- c. PNPB Lelang = Rp5.171.082.677 (dari target Rp7.220.000.000).

Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung selama 4 tahun dari tahun 2017 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung**

	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	1.800.000.000	2.442.367.000	2.252.775.511	3.950.012.196
PNBP Piutang Negara	49.603.493	45.689.637	68.254.069	30.990.633
PNBP Lelang	2.935.000.000	2.221.595.097	2.555.558.061	2.555.558.061
	2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	1.449.009.395	5.381.762.503	7.526.415.000	7.796.577.649
PNBP Piutang Negara	51.474.247	28.849.076	869.641	7.096.870
PNBP Lelang	6.671.660.000	5.087.574.173	7.220.000.000	5.171.082.677

**b. 1b-CP Tingkat Penurunan *outstanding* piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)**

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Tingkat Penurunan *outstanding* piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)**, antara lain pada Triwulan IV *outstanding* sudah mencapai target. Tercatat sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 *outstanding* yang dicapai adalah Rp412.088.874 dari target Rp324.948.758 (3,81%).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan PSBDT (terutama yang bernilai dibawah Rp8.000.000,00 karena tidak memerlukan survey lapangan).
2. Melaksanakan pengurusan berkas BKN dengan SP3N per 31 Desember 2016 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.
3. Mengusulkan perubahan target antar KPKNL dalam satu Kantor Wilayah.

**Tabel 3. 4 Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara**

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal						Pol/ K P
	1b-CP Tingkat Penurunan <i>outstanding</i> piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	
Target sebelum adendum	99%	98%	98%	97%	95%	95%	Max/TLK
Target setelah adendum	0,5%	1%	1%	2%	3%	3%	
Realisasi	0,16%	1,87%	1,87%	3,28%	3,81%	3,81%	
Capaian setelah adendum	32,16%	120%	120%	120%	120%	120%	

**c. 1c-N Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Pada Triwulan III Tahun 2020, IKU **Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK** telah tercapai 188 SBSK dari target 188 (100%). Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan mobilisasi (wabah *COVID-19*), menyulitkan koordinasi dengan satuan kerja, khususnya berkenaan dengan kondisi fisik aset, mengingat satker dalam posisi WFH.
2. Keterlambatan penyampaian manual IKU dan kertas kerja penghitungan SBSK untuk KPKNL form baru diterima pada tanggal 03 April 2020 sehingga proses pengumpulan dokumen dan penghitungan kinerja baru dapat dilaksanakan secara efektif pada periode Q2.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk memastikan manal IKU dan kesediaan kerja kerja pengukuran SBSK.
2. Mengusulkan *addendum* target.

3. Menyepakati bahwa bulan Juli diupayakan target satu tahun selesai.
4. Melakukan inventarisasi data dukung pengukuran SBSK dari satuan kerja terpilah.
5. Mengupayakan koordinasi dengan satuan kerja dengan memanfaatkan media elektronik.

Capaian Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal						
	1c-N Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target sebelum adendum	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Min/TLK
Target setelah adendum	-	50%	50%	75%	100%	100%	
Realisasi	0%	35%	35%	88,3%	100%	100%	
Capaian setelah adendum	0,00%	70,90%	70,90%	117,73%	100%	100%	

## 2. Sasaran Strategis: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

### 2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan oleh pegawai KPKNL Bandar Lampung. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*Quick Win*). Survey dilakukan secara mandiri dengan menyampaikan kuesioner kepada pengguna layanan baik pada bidang pengelolaan kekayaan Negara, piutang Negara, penilaian, dan lelang. Kuesioner dibagikan kepada para satuan kerja pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2020, yang selanjutnya dilakukan kompilasi dan penghitungan indeks kepuasan pengguna layanan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

K-Wide	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien						
	2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	4,37	4,37	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	4,59	4,59	
Capaian					105,03%	105,03%	

Realisasi IKU yang diperoleh dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL terdiri atas rincian sebagai berikut:

No	Bidang Layanan	Total Indeks
1	Pengelolaan Kekayaan Negara	4,38
2	Piutang Negara	5
3	Pelayanan Penilaian	4,53
4	Pelayanan Lelang	4,46
<b>TOTAL IKPL</b>		<b>4,59</b>

Sehingga rata-rata dari seluruh capaian IKPL tersebut di atas adalah 4,59 dari target 4,37 (capaian=105,03%). Hal tersebut dapat dicapai KPKNL Bandar Lampung dengan capaian di atas target yang ditetapkan dengan selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar layanan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada, dan selalu menerima masukan berupa kritikan dan saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk peningkatan layanan pada periode berikutnya.

Perbandingan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung selama 4 tahun dari tahun 2017 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung

	2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,22	4,36	4,25	4,52	4,37	4,4	4,37	4,59

### 3. Sasaran Strategis: Pengelolaan lelang yang optimal

#### 3a-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi pokok lelang dibagi dengan target pokok lelang yang ditetapkan. Untuk realisasi pokok lelang bersumber dari lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)**, antara lain sebagai berikut:

1. Barang yang dilelang tidak *free and clear* (masih berpenghuni/masih ada permasalahan) namun guna mencapai target yang diharapkan upaya menjadikan laku tetap menjadi prioritas utama.
2. Masih banyaknya masyarakat belum sadar lelang dan tidak mengetahui bagaimana alur lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan indentifikasi target per jenis objek lelang.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan pelaksanaan lelang barang gadai.
3. Membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan BPR dan *stakeholder* potensial.
4. Sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholder* agar menginventarisir permohonan yang berpotensi laku/*marketable*.

Capaian Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)

K-Wide	Pengelolaan lelang yang optimal						Pol/ K P
	3a-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	
Target sebelum adendum	10%	30%	30%	60%	100%	100%	Max/TLK
Target setelah adendum	10%	30%	30%	50%	100%	100%	
Realisasi	15,46%	29,81%	29,81%	43,25%	71,28%	71,28%	
Capaian setelah adendum	120%	99,38%	99,38%	86,5%	71,28%	71,28%	

Realisasi IKU ini terdiri berasal dari capaian pokok lelang berasal dari :

- a. Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp 115.732.106.036 dari target Rp161.620.000.000 (71,61%)
- b. Pegadaian sebesar Rp20.600.094.600 dari target Rp29.650.000.000 (69,47%)

Sehingga total capaian adalah **Rp136.332.200.636 dari target Rp191.270.000.000 (71,28%)**.

Perbandingan capaian Persentasi hasil lelang (Pokok Lelang) pada KPKNL Bandar Lampung selama 4 tahun dari tahun 2017 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan capaian Persentasi hasil lelang (Pokok Lelang) pada KPKNL Bandar Lampung

Persentase Hasil Pokok Lelang	2017	2018	2019	2020
Target	73.000.000.000	97.713.000.000	180.335.000.000	191.270.000.000
Realisasi	47.194.748.875	49.015.052.105	144.993.911.829	136.332.200.636

#### 4. Sasaran Strategis: Manajemen pelayanan yang berkualitas

##### 4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang

Dalam program menuju manajemen pelayanan yang berkualitas, penempatan petugas khusus untuk memonitoring pelaksanaan layanan kiranya perlu dipersiapkan dengan baik agar ketepatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma waktu/ *Standard Operating Procedure* (SOP), dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga capaian untuk Q4 IKU ketepatan waktu layanan dapat dijaga dengan baik. Akar masalah dari IKU antara lain adalah karena masih terdapat proses bisnis yang tidak mematuhi SOP, sehingga perlu *extra effort* dalam mengupayakan percepatan respon atas setiap proses permohonan dari pengguna layanan. Untuk memberikan kepastian janji layanan kepada pengguna jasa. Dengan implimentasi penuh pemanfaatan Nadine, diharapkan dapat semakin mempermudah dan mempercepat proses layanan kepada pengguna jasa.

Capaian Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang

K-Wide	Manajemen pelayanan yang berkualitas						
	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	86	86	86	86	86	86	Max/TLK
Realisasi	94,17	99,43	96,80	96,40	96,03	96,51	
Capaian	109,50%		112,56%			112,22%	

## 5. Sasaran Strategis: Tata kelola kekayaan negara yang efektif

### 5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada Kemeterian/Lembaga berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan.
4. Kemeterian/Lembaga melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN *c.q.* Kantor Pertanahan.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang dilakukan di awal tahun 2020, antara DJKN dengan satuan kerja, BPN mempercepat realisasi sertifikasi tahun 2020 pada periode Q1, yaitu sebanyak 87 sertifikasi.
2. BPN melaksanakan percepatan realisasi sertifikasi pada Triwulan I Tahun 2020.

Capaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan oleh KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

K-Wide	Tata kelola kekayaan negara yang efektif						
	5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	20%	20%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	88	47,28%	47,28%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	100%	100%	

Capaian 100% diperoleh oleh KPKNL Bandar Lampung dari 87 bidang tanah BMN yang ditargetkan untuk disertifikasi terealisasi di tahun 2020 sejumlah 87 bidang tanah BMN yang disertifikatkan.

## 5b-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase efektivitas penyelesaian BKPN** (Berkas Kasus Piutang Negara) antara lain:

1. Rencana penarikan terkendala oleh kebijakan Kepala/Pimpinan Satker/ penyerah piutang yang lama ke pimpinan/kepala yang baru.
2. Pemanggilan debitur, kunjungan lapangan, penyampaian Surat Paksa yang masih minim dilakukan dan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala biaya serta bencana *COVID-19*.
3. Umur piutang sudah lama.
4. Tidak didukung barang jaminan.
5. Keberadaan debitur tidak diketahui.
6. Dokumen pendukung tidak lengkap.
7. Penolakan pembayaran oleh debitur Karena merasa tidak memiliki hutang.
8. Lokasi debitur jauh dari perbankan sehingga terkendala untuk melakukan penyetoran.
9. Adanya bencana *COVID-19* yang tidak memungkinkan untuk melakukan penagihan piutang Negara secara langsung.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan kepada debitur dan melakukan pemanggilan debitur.
2. Koordinasi yang lebih intensif dengan debitur.
3. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui intensifikasi dan penelitian lapangan terhadap masing-masing penanggung hutang.
4. Mencari informasi keberadaan penanggung hutang melalui aparat kelurahan/desa setempat.
5. Melakukan kunjungan lapangan terkait pemberitahuan Surat Paksa.
6. Pembuatan PSBDT dengan nilai nominal dibawah 9 juta dan umur BKPN sudah cukup lama. Serta ditunjang dengan Surat Keterangan dari penyerah piutang ataupun surat keterangan yang dibuat oleh aparat setempat (kelurahan/desa).
7. Mengusulkan penambahan target menjadi 103 berkas.
8. Pada Triwulan IV telah tercapai BKPN sebagai berikut:
  - Kategori I (91 berkas);
  - Kategori II (20 berkas);
  - Kategori III (0 berkas).

Capaian Persentase efektivitas penyelesaian BKN oleh KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Persentase efektivitas penyelesaian BKN

K-Wide	Tata kelola kekayaan negara yang efektif						Pol/ K P
	5b-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	
Target	10%	40%	40%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	8,13%	158,44%	158,44%	143,49%	163,02%	163,02%	
Capaian	81,25%	120%	120%	120%	120%	120%	

#### 5c-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi

Tujuan yang ingin dicapai dari IKU ini adalah untuk memastikan aset yang dikelola oleh DJKN telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*). Nilai utilisasi diakui ketika surat persetujuan/keputusan/ penyampaian terkait utilisasi telah diterbitkan. Nilai kekayaan negara yang diutilisasi diperoleh dari nilai kekayaan negara yang ditetapkan utilisasinya dengan batasan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Utilisasi melalui pemanfaatan, yang diukur dari:
  - a) nilai BMN yang disewakan;
  - b) nilai BMN yang di-KSP-kan;
  - c) nilai BMN yang di-BGS/BSG-kan;
  - d) nilai BMN yang dipinjamkakan.
2. Utilisasi melalui penetapan status penggunaan, yang diukur dari:
  - a) nilai BMN yang ditetapkan status penggunaannya;
  - b) selisih nilai BMN hasil penyesuaian pelaksanaan revaluasi BMN atas BMN yang telah diutilisasi s.d tahun 2018;
  - c) nilai KNL yang ditetapkan status penggunaannya.
3. Utilisasi melalui hibah atas BMN untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diukur dari nilai aset yang dihibahkan.
4. Utilisasi melalui tukar-menukar, yang diukur dari nilai aset baru hasil tukar menukar.
5. Utilisasi melalui penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah, yang diukur dari nilai aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal.
6. Utilisasi melalui penetapan aset sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di awal waktu, khususnya untuk satuan kerja yang memiliki outstanding PSP dengan kategori besar.
2. Melakukan monitoring dan mitigasi zero PSP dapat direalisasikan pada akhir tahun 2020.

- Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu terkait perubahan target antar KPKNL dalam satu kantor wilayah.

Capaian Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi oleh KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 13 Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi**

K-Wide	Tata kelola kekayaan negara yang efektif						Pol/ K P
	5c-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-20	
Target	5%	30%	30%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	36,87%	64,68%	64,68%	74,77%	219,13%	219,13%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja pada awal tahun 2020 yang memungkinkan percepatan realisasi untuk IKU utilisasi. Sehingga, pada periode Q4 tercapai utilisasi senilai Rp9.689.589.850.770 dari target Rp4.421.879.825.911 (219,13%).

Perbandingan capaian Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi pada KPKNL Bandar Lampung selama 4 tahun dari tahun 2017 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Realisasi dan Target Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi**

Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	2017	2018	2019	2020
Target	1.480.000.000.000	1.500.000.000.000	3.948.770.000.000	4.421.879.825.911
Realisasi	2.153.736.682.745	1.676.487.524.051	4.110.705.878.502	9.689.589.850.770

#### 5d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN, maka ditetapkanlah KMK Nomor 349/KM.0/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN. Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN diterapkan ketika Kementerian/Lembaga membutuhkan

informasi tentang bagaimana portofolio BMN mereka berkinerja, khususnya untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan pengelolaan BMN terkait:

1. Perencanaan aset strategis untuk memenuhi kebutuhan seluruh entitas pemerintah pusat/Kementerian/Lembaga;
2. Keputusan perencanaan sebelum pengadaan dan investasi, termasuk dalam proses penyusunan dokumen penganggaran khususnya alternatif pendanaan/pembiayaan aset;
3. Keputusan penghapusan dan rasionalisasi aset;
4. Keputusan penggantian/pengadaan baru;
5. Keputusan pemeliharaan, renovasi, restorasi dan everhaul aset; dan/atau
6. Benchmarking kinerja aset dan perbaikan terus-menerus.

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)** antara lain karena adanya pembatasan mobilisasi (wabah pandemic COVID-19), menyulitkan koordinasi dengan satuan kerja, khususnya berkenaan dengan kondisi fisik aset, mengingat satuan kerja terkait dalam posisi WFH.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi satuan kerja terpilah yang menjadi objek evaluasi kinerja BMN.
2. Koordinasi dengan satuan kerja terpilah dan BPS agar evaluasi BMN dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Mengupayakan koordinasi via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait, misalnya mencantumkan kondisi fisik dalam bentuk foto atau video objek evaluasi kinerja BMN.

**Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:**

**Tabel 3. 15 Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)**

K-Wide	Tata kelola kekayaan negara yang efektif						Pol/ K P
	5d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	
Target sebelum adendum	25%	50%	50%	80%	100%	100%	Max/TLK
Target setelah adendum	-	50%	50%	80%	100%	100%	
Realisasi	4,06%	4,06%	4,06%	147,92%	179,17%	179,17%	
Capaian setelah adendum	45,83%	22,92%	22,92%	120%	120%	120%	

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN merupakan IKU baru yang belum pernah ada sebelumnya di seksi PKN. Evaluasi kinerja BMN (portofolio) di KPKNL Bandar Lampung difokuskan pada satuan kerja Kementerian Keuangan yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 telah tercapai 172 dari target 96 portofolio (179,17%).

## 6. Sasaran Strategis: Penilaian yang berkualitas

### 6a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Dalam pelaksanaan penilaian di tahun 2020 tim penilai sempat terkendala untuk terjun langsung ke lapangan. Namun dalam pelaksanaannya, penilaian sesuai dengan SOP yang ditetapkan, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19.

**Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:**

Tabel 3. 16 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

K-Wide	Penilaian yang berkualitas						
	6a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Max/AVG
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 7. Sasaran Strategis: Tata kelola lelang yang efektif

### 7a-CP Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai satu frekuensi lelang laku.

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase produktivitas lelang** adalah sebagai berikut:

1. Tinggi nya pelaksanaan lelang di KPKNL Bandar Lampung;
2. Potensi barang yang dilelang tidak *free and clear* (masih berpenghuni/masih ada permasalahan) namun masih sangat dimungkinkan ada pembeli dan laku;
3. Memungkinkan timbul masalah gugatan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya pelaksanaan lelang yang dipaksakan.

Capaian Persentase produktivitas lelang pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Persentase produktivitas lelang

K-Wide	Tata kelola lelang yang efektif						Pol/ K P
	7a-CP Persentase produktivitas lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Max/TLK
Target	15%	20%	20%	25%	34%	34%	
Realisasi	26,58%	44%	44%	34,76%	34,31%	34,31%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	100,92%	100,92%	

Realisasi IKU ini terdiri berasal dari produktivitas pelaksanaan lelang dimana Jumlah Frekuensi Lelang Laku secara keseluruhan adalah 380 dari Jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan adalah 1.012.

#### 7b-CP Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* merupakan inovasi DJKN dalam rangka memberikan layanan di KPKNL, khususnya dalam hal modernisasi pelaksanaan lelang. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)
3. *E-auction* dan *e-conventional auction* pada DJKN terdiri atas penawaran tertutup (*close bidding*) dan penawaran terbuka (*open bidding*).

Isu Utama dalam pencapaian IKU adalah pelaksanaan *e-auction* menjadi target utama pelaksanaan lelang tahun 2020, sehingga implikasinya adalah pada pelayanan lelang tahun 2020 diutamakan melalui pelaksanaan *e-auction*.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan *e-auction corner* di KPKNL Bandar Lampung;
2. Sosialisasi pelaksanaan lelang melalui *e-auction* langsung kepada setiap pemohon lelang.

Capaian Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

K-Wide	Tata kelola lelang yang efektif						
	7b-CP Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	50%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	102,94%	102,94%	

## 8. Sasaran Strategis: Edukasi yang efektif

### 8a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Tujuan yang akan dicapai dari pemenuhan IKU ini adalah meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM pada KPKNL. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Capaian Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

K-Wide	Edukasi yang efektif						
	8a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		88	88		88	88	Max/TLK
Realisasi		95	95		95	95	
Capaian		107,95%	107,95%		107,95%	107,95%	

Perbandingan capaian Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung selama 6 tahun dari tahun 2015 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Target dan Realisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	80	85	85	85	87	88
Realisasi	82,63	90	90	90	90	95

## 9. Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian yang efektif

### 9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilitasnya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilitas berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat

persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

**Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:**

**Tabel 3. 21 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset**

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	80%	80%	Max/TLK
Realisasi		100%	100%		100%	100%	
Capaian		120%	120%		120%	120%	

IKU terkait Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada Semester I telah tercapai dengan baik. Terdapat 32 total persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2019 yang ditindaklanjuti oleh K/L dan terdapat 32 Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2020.

Pada Semester II telah terdapat 9 persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L dan terdapat 9 jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang pada Semester II 2020.

**9b-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN**

Sesuai amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang PEDoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Dan sehubungan dengan surat Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, pada pokoknya BPK menyampaikan sebagai berikut:

1. Hasil revidu dengan pengujian terbatas atas perbaikan penilaian kembali BMN diketahui bahwa Pemerintah telah melakukan penyempurnaan desai pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN secara memadai. Selain itu, perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara signifikan dan hasilnya direvidu oleh APIP.
2. Pemerintah dapat menyajikan hasil revaluasi BMN tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan:
  - a. Pengelola Barang dan Pengguna Barang harus selesai menindaklanjuti seluruh hasil revidu APIP paling lambat akhir Januari 2020.

- b. Pemerintah tetap harus menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020.
- c. BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP (*unaudited*).

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut KPKNL Bandar Lampung telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbaikan nilai untuk BMN K1 yang berupa bangunan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait.

Adapun kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan IKU yaitu adanya pembatasan mobilisasi karena adanya wabah *COVID-19*, tidak memungkinkan dilakukan survei ke lapangan untuk objek berupa tanah, adapun untuk objek berupa bangunan tidak dimungkinkan klarifikasi formulir secara langsung dengan PIC Satuan Kerja.

Capaian Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 22 Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN**

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	9b-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target sebelum adendum	10%	25%	25%	75%	100%	100%	Max/TLK
Target setelah adendum	5%	25%	25%	75%	100%	100%	
Realisasi	0%	1,69%	1,69%	69,64%	100,07%	100,07%	
Capaian setelah adendum	0%	6,78%	6,78%	92,85%	100,07%	100,07%	

Total Realisasi tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali adalah 10.630,00 dari target 10.623 (100,07%).

## 10. Sasaran Strategis: SDM yang kompeten

### 10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi. Bahkan bisa dikatakan SDM merupakan hal yang paling esensial dari seluruh *resources* yang

diperlukan untuk sebuah organisasi berjalan dengan baik. Pada prinsipnya, pengembangan SDM (*Human Capital Development*) merupakan bagian dari manajemen SDM (*Human Capital Management*) yaitu *learning & development management*. Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis ditunjukkan dengan kesesuaian antara tugas/fungsi Jabatan dengan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti. Pendidikan/pelatihan tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya maupun Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 yang terkait bidang teknis tempat pegawai tersebut bekerja (Unit Eselon IV) Pengembangan kompetensi pegawai dicapai dengan kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada masing-masing seksi yang ada di KPKNL.

Terdapat 25 bawahan yang memenuhi kriteria dan 25 bawahan yang melebihi kriteria dalam pengembangan kompetensi pegawai dari jumlah total 25 pegawai. Berdasarkan hal tersebut perlunya peningkatan upaya atas rekomendasi diklat bagi pegawai yang memenuhi kriteria dan mempermudah pegawai untuk mengikuti diklat yang bersifat *massive*, dimana diklat ini bisa diikuti oleh semua pegawai tanpa terkecuali.

Capaian Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Persentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Wide	SDM yang kompeten						
	10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	25%	100%	100%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 11. Sasaran Strategis: Organisasi yang *fit for purpose*

### 11a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-552/WKN.05/2020 perihal Penyampaian Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2020, KPKNL Bandar Lampung memperoleh nilai 92 (dari target nilai 70). Terdapat beberapa parameter atas penilaian pengelolaan kinerja berbasis BSC, yaitu :

1. Kualitas dokumentasi perencanaan kinerja (100)
2. Dokumentasi pelaksanaan/eksekusi kinerja (100)

3. Penilaian manual IKU Non Pemilik Peta Strategi (93,51)
4. Kualitas dokumentasi monitoring dan evaluasi (100)
5. Kualitas tindak lanjut monitoring dan evaluasi (86,5)
6. Kualitas edukasi pengelolaan kinerja (93,06).

Akar masalah dalam pencapaian IKU adalah karena minimnya pengetahuan pegawai terkait dengan pengelolaan kinerja. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk menghadapi masalah tersebut antara lain:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi K3 sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-150/WKN.05/KNL.03/2020 perihal Undangan Sosialisasi terkait Kualitas Kontrak Kinerja (K3) Periode Tahun 2020.
2. Memberikan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja kepada para pegawai KPKNL Bandar Lampung melalui berbagai media, misalnya melalui Poster.

Capaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 24 Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC**

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	11a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	70	70	Max/TLK
Realisasi					92	92	
Capaian					120%	120%	

#### 11b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai

Permasalahan yang dihadapi untuk terpenuhinya IKU tersebut antara lain:

1. Adanya COVID-19 yang menyerukan *physical distancing* membuat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menunda kegiatan FGD Kode Etik Triwulan I.
2. Target Q3 Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai masih menunggu hasil penilaian atas survey yang telah dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk terpenuhinya IKU tersebut dilakukan dengan cara:

1. Berkoordinasi kepada pihak Kantor Pusat terkait tema FGD dan pelaksanaannya, yang kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengeluarkan Nota Dinas penundaan FGD Kode Etik Triwulan I oleh Pejabat Administrator.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Subbagian Umum terkait pelaksanaan FGD Kode Etik pada Triwulan Selanjutnya.

Capaian Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	11b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi		89,9	89,9	90,6	91,33	91,33	
Capaian		112,4%	112,4%	113,25%	114,17%	114,17%	

## 12. Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

### 12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tidak diperhitungkannya realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran hal ini mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-304/KN.13/2020 hal Penyampaian Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2020 dan Kebijakan dalam Masa Terdampak Pandemi COVID-19.
3. Surat Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 hal Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN.

Akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

1. Dengan adanya wabah COVID-19, pemerintah melakukan relokasi anggaran Belanja modal (53) yang tidak terserap dan anggaran Belanja barang (52) yang kemungkinan tidak terserap seperti Perjalanan Dinas, rapat dan sebagainya, guna kesehatan masyarakat.
2. Capaian TW4 terjadi penurunan karna terdapat bobot 60% atas Nilai EKA (SMART) yg hanya dikenakan pada akhir tahun. Lalu ada nilai konfirmasi capaian *output* pada IKPA yg turun akibat kesalahan sistem, sudah disii namun tidak terbaca sistem KPPN.

Tindakan dan rekomendasi yang dilaksanakan di KPKNL Bandar Lampung:

1. Meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.
2. Mengupayakan kualitas pelaksanaan anggaran dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

K-Wide	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	-	-	95%	95%	95%	Max/AVG
Realisasi				100%	93,01%	95,30%	
Capaian				105,26%	97,90%	100,32%	

Perbandingan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Bandar Lampung selama 6 tahun dari tahun 2015 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Realisasi	99%	107%	107%	87%	85%	100%

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Bandar Lampung mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020. Penyerapan anggaran mencapai 95,30% dari pagu yang diterima KPKNL Bandar Lampung sebesar Rp3.575.723.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pencapaian tersebut diperoleh dari komponen realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Berikut uraian realisasi anggaran KPKNL Bandar Lampung yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

**Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung**

	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
PAGU	Rp1.313.694.000,-	Rp1.846.698.000,-	Rp415.331.000,-
REALISASI	Rp1.313.690.358,-	Rp1.844.748.661,-	Rp415.027.900,-
PRESENTASE	100%	99,89%	99,93%
SISA	Rp3.642,-	Rp1.949.339,-	Rp303.100,-

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN, peta strategi dan kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Bandar Lampung. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Secara umum, pencapaian kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2020 telah sesuai dengan target dalam kontrak kinerja. Bahkan beberapa IKU mendapatkan nilai capaian di atas 100%. Ada 2 (dua) IKU yang belum mencapai target, yakni IKU "Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang" 87,92% (status kuning) dan IKU "Persentase hasil lelang (pokok lelang)" yang nilai capaiannya sebesar 71,28% (status merah). Sedangkan delapan belas IKU status hijau dengan capaian rata-rata diatas 100%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2020 diketahui bahwa nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 104,44%.

Meskipun capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung telah sesuai dengan target, upaya untuk memperbaiki kinerja tetap terus dilaksanakan. Tuntutan menjadi "*Distinguished Asset Manager*" mengharuskan DJKN khususnya KPKNL Bandar Lampung bergerak lebih inovatif kedepannya. Tuntutan dan tantangan ini melecutkan semangat KPKNL Bandar Lampung untuk bekerja lebih keras sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal baik diperoleh dari pengelolaan asset/kekayaan negara, maupun dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

# LAMPIRAN



KONTRAK KINERJA  
NOMOR 8 /KN.17/2020

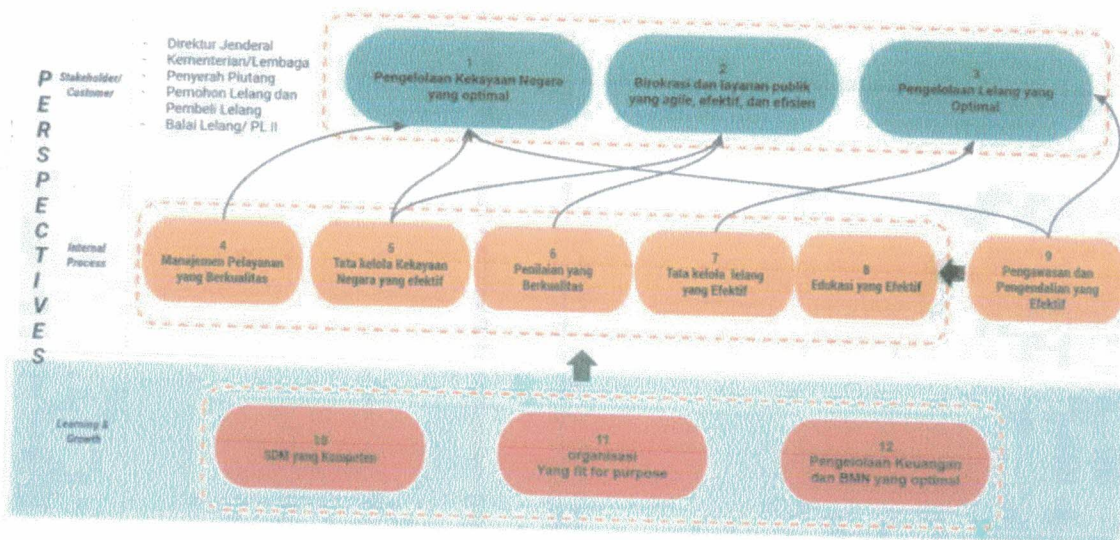
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI



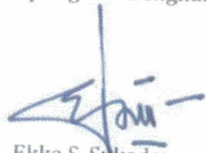
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	95%
		1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,37 (Skala 5)
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86 (skala 100)
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	90%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88
9.	Pengawasan dan pngendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%
		9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%
10.	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
11.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (skala 100)
		11b-N	indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80 (skala 100)
12.	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan, Ouput, dan Indikator Output	Anggaran
1. Surat Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Pengelolaan BMN	Rp84.508.000,00
2. Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp14.172.000,00
3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	Rp4.552.000,00
4. Implementasi Evaluasi Kinerja BMN	Rp114.780.000,00
5. Piutang Negara yang Diselesaikan pada KPKNL	Rp50.142.000,00
6. Hasil dan Produktivitas Lelang	Rp66.856.000,00
7. Pengelolaan Aset Bun Lingkup KPKNL	Rp95.762.000,00
8. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp596.129.000,00
9. Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp77.768.000,00
10. Layanan Perkantoran	Rp3.891.923.000,00

Bandar Lampung, 31 Januari 2020

Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Lampung dan Bengkulu



Ekka S. Sukadana  
NIP 19621217 199203 1 001

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Bandar Lampung



Didith A. Andiana  
NIP 19750523 199503 1 001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2020**

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</b>								
	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	99%	98%	98%	97%	97%	95%	95%
	1c-N	Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>2</b>	<b>Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien</b>								
	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,37	4,37 (Skala 5)
<b>3</b>	<b>Pengelolaan lelang yang optimal</b>								
	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Manajemen pelayanan yang berkualitas</b>								
	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86	86	86	86	86	86	86 (skala 100)
<b>5</b>	<b>Tata kelola kekayaan negara yang efektif</b>								
	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
	5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
<b>6</b>	<b>Penilaian yang berkualitas</b>								
	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
<b>7</b>	<b>Tata kelola lelang yang efektif</b>								
	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	15%	20%	20%	25%	25%	34%	34%
	7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	10%	30%	30%	50%	50%	90%	90%
<b>8</b>	<b>Edukasi yang efektif</b>								
	8a-CP	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	88	88	-	88	88	88
<b>9</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian yang efektif</b>								
	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	-	40%	40%	-	40%	80%	80%
	9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan	10%	25%	25%	75%	75%	100%	100%

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	atas sisa aset objek penilaian kembali BMN							
<b>10</b>	<b>SDM yang kompeten</b>							
10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>11</b>	<b>Organisasi yang fit for purpose</b>							
11a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	-	-	-	-	-	70	70 (skala 100)
11b-N	indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
<b>12</b>	<b>Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal</b>							
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Bandar Lampung, 31 Januari 2020

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung,



Didith A. Andiana  
NIP 19750523 199503 1 001

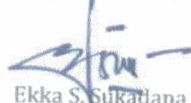
Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Ekka S. Sukadana	1	Nama	Didith A. Andiana
2	NIP	19621217 199203 1 001	2	NIP	NIP 19750523 199503 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV.d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I / IV.b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
2	Mengurangi nilai <i>outstanding</i> piutang negara	-	5%	100	12 bulan	-
3	Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	-	100%	100	12 bulan	-
4	Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4,37 (Skala 5)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan hasil lelang (Pokok lelang)	-	100%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang dengan tepat waktu	-	86 (skala 100)	100	12 bulan	-
7	Meningkatkan bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	100%	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
9	Menetapkan nilai kekayaan negara yang diutilisasi	-	100%	100	12 bulan	-
10	menerapkan evaluasi kinerja BMN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan ketergunaan hasil penilaian	-	70%	100	12 bulan	-
12	Meningkatkan produktivitas lelang	-	34%	100	12 bulan	-
13	Mengimplementasikan <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	-	90%	100	12 bulan	-
14	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	88	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	80%	100	12 bulan	-
16	Menindaklanjuti penyelesaian/perbaikan atas Sisa Aset Objek Penilaian Kembali BMN	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan pengelolaan kinerja berbasis BSC yang baik	-	70 (skala 100)	100	12 bulan	-
19	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai	-	80 (skala 100)	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran	-	95%	100	12 bulan	-

Bandar Lampung, 31 Januari 2020

Pejabat Penilai,



Ekka S. Sukadana  
NIP 196212170199203 1 001

PNS yang Dinilai,



Didith A. Andiana  
NIP 19750523 199503 1 001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Percepatan kajian evaluasi kinerja BMN terpilah	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp114.780.000

Bandar Lampung, 31 Januari 2020

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Bandar Lampung.



Didith A. Andiana  
NIP 19750523 199503 1 001

## ADENDUM KONTRAK KINERJA

NOMOR: 8A/KN.17/2020

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Kontrak Kinerja Nomor: 8/KN.17/2020 tanggal 31 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama dan Target							
	Sebelum				Menjadi			
1b-CP	Tingkat Outstanding Piutang Negara (Polarisasi <i>minimize</i> )				Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Polarisasi <i>maximize</i> )			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	99%	98%	97%	95%	0,5%	1%	2%	3%

### B. Perubahan target dan/atau trajectory

Kode IKU	IKU	Sebelum				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok lelang)	10%	30%	60%	100%	10%	30%	50%	100%
1c-N	Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	25%	50%	75%	100%	-	50%	75%	100%
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN/portofolio aset	25%	50%	80%	100%	-	50%	80%	100%
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	10%	25%	75%	100%	5%	25%	75%	100%

**Catatan:**

1. Perubahan IKU, target tahunan, dan target *trajectory* IKU mengacu pada Peraturan yang berlaku terkait Pandemi Covid-19.
2. Adendum KK ini mulai berlaku pada triwulan I tahun 2020.



Bandar Lampung, Agustus 2020

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung  
dan Bengkulu



Arik Hariyono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Bandar Lampung



Didith A. Andiana

## Perubahan manual IKU

Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1. PNBPN Pengelolaan BMN Rp9.595.000.000,- 2. PNBPN Biad PPN Rp9.748.462,74 3. PNBPN Lelang Rp7.220.000.000,-  Total Raw Data Target Rp16.824.748.462,74	1. PNBPN Pengelolaan BMN Rp7.526.415.000,- 2. PNBPN Biad PPN Rp869.640,66 3. PNBPN Lelang Rp7.220.000.000  Total Raw Data Target Rp14.747.284.640,66
1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	263 NUP	188 NUP
1b-CP	Tingkat penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp10.831.625.271,67 b. Proyeksi penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp487.423.137,23	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp Rp10.831.625.271,67 b. Target penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp324.948.758,15 (3% dari Rp Rp10.831.625.271,67)
5a-CP	Persentase Bidang tanah yang disertifikatkan	184 Bidang (raw data target)	87 Bidang (raw data target)
5b-CP	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	80 BKPN (raw data target)	96 BKPN (raw data target)
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN/portofolio aset	271 NUP	96 NUP

Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	<p>11.094 NUP</p> <p>Formula:            (Jumlah NUP K1 yang status LHIP selesai/Jumlah NUP K1) x 100%</p>	<p>10.623 NUP</p> <p>Formula:            [(NUP S1 x 10%) + (NUP S2 x 20%) + (NUP S3 x 30%) + (NUP S4 x 40%) + (NUP S5 x 60%) + (NUP S6 x 70%) + (NUP S7 x 80%) + (NUP S8 x 90%) + (NUP S9 x 100%)]/ Total Target NUP x 100%</p>